

PERAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DI ERA DIGITAL

Halimatus Sa'diyah¹, Moh. Raffi Prastyo², Nikita Khairani Santoso³, Reva Astrid Putri Sritama³, Yuliana Tria Agustina⁴

¹Corresponding author, Email: halimatus.sadiyah.2404216@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Cakrawala No. 05, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Sexual deviation is a sexual activity undertaken by someone to obtain sexual pleasure in an inappropriate manner. It is considered deviant if the sexual behavior does not conform to norms and can harm others. One form of sexual deviation is LGBT. LGBT is a sexual orientation that does not conform to social or religious norms in Indonesian society. The research was conducted to understand the role and perspective of Pancasila towards LGBT in the technological era. The type of research used is qualitative with a descriptive design. The method used is literature review. The research results show that technology has a significant impact on the dissemination of issues, information, and communities around LGBT. Pancasila, as the nation's guiding principle, upholds moral and ethical values reflected in each of its principles, which must be adhered to by the Indonesian people.

Keywords: *Pancasila, Technology, LGBT*

Abstrak

Penyimpangan Seksual merupakan sebuah aktifitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak sewajarnya. Dikatakan menyimpang apabila perilaku seksual tersebut tidak sesuai norma, serta dapat merugikan orang lain. Salah satu perilaku dari penyimpangan seksual ini adalah LGBT. LGBT merupakan orientasi seksual yang tidak sesuai norma norma sosial maupun keagamaan alam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan pandangan pancasila terhadap LGBT pada zaman teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan deskriptif. Metode yang digunakan adalah kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran isu, informasi, serta komunitas seputar LGBT. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa menjunjung tinggi nilai moral dan etika yang tercermin dalam setiap sila dalam pancasila yang harus dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Pancasila, Teknologi, LGBT*

PENDAHULUAN

Perilaku penyimpangan seksual seperti Lesbian, Gay, Bisexual dan Transegender (LGBT) menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Fenomena ini terus menjadi perdebatan hangat di masyarakat Internasional maupun Nasional. Secara garis besar penyimpangan seksual LGBT adalah perilaku atau orientasi seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender), pandangan mengenai apakah ini merupakan penyimpangan seksual sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang budaya, agama, hukum, atau sains, tidak sedikit pula negara negara di dunia yang telah mendukung, menormalisasikan

perilaku LGBT dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Munculnya isu LGBT di Indonesia telah memicu reaksi beragam di masyarakat, menghasilkan pro dan kontra yang signifikan. Kasus-kasus publik yang melibatkan figur terkenal semakin memperkuat perdebatan ini. Sebagai contoh, pengumuman perubahan gender oleh Dena Rachman pada tahun 2013, dari laki-laki menjadi perempuan, menarik perhatian publik dan memicu perbincangan mengenai identitas gender. Sementara itu, kasus Saipul Jamil pada tahun 2016, yang terlibat tuduhan pencabulan terhadap seorang penggemar sesama jenis, menunjukkan sisi lain dari kompleksitas isu LGBT di Indonesia dan dampaknya pada persepsi masyarakat. Kedua kasus ini, dan lainnya yang serupa, mengungkapkan betapa isu LGBT di Indonesia tidak hanya tentang orientasi seksual atau identitas gender, tetapi juga tentang hukum, moralitas, dan persepsi sosial yang saling terkait dan kompleks. Sebenarnya keberadaan kelompok LGBT telah ada di Indonesia sejak lama. Namun, selama bertahun-tahun, mereka cenderung hidup secara tertutup, menghindari publisitas karena stigma negatif dan pandangan masyarakat yang masih tabu terhadap isu LGBT. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerimaan yang luas di masyarakat Indonesia terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Namun, belakangan ini, isu LGBT telah menjadi perbincangan hangat di berbagai negara bahkan di dunia, dengan banyak negara yang mulai mendukung legalisasi hak-hak kelompok LGBT dan mengkampanyekan kesetaraan. Perubahan iklim sosial ini, yang ditandai dengan meningkatnya dukungan terhadap hak-hak LGBT di berbagai negara, secara tidak langsung telah memberikan dampak dan pengaruh terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Kurangnya aturan hukum yang secara spesifik yang mengatur perilaku LGBT di Indonesia menimbulkan dilema penegakan hukum. Berawal dari kasus-kasus tersebut maka penelitian ini akan menganalisis implikasi sosial dan hukum keberadaan komunitas LGBT di Indonesia, menelaah kerangka hukum yang ada, dan mengusulkan pengembangan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan perilaku seksual di era modern.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam menghadapi tantangan penyimpangan seksual di era digital, dengan fokus pada studi kasus komunitas LGBT. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan dalam menyikapi isu LGBT yang berkembang pesat di ruang digital. Karakteristik multikultural Indonesia menjunjung tinggi norma kesopanan, kesusilaan, dan agama, yang mendefinisikan hubungan sah sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan analisis. Peneliti menggunakan analisis literatur untuk menggali berbagai pandangan, teori, dan kebijakan yang terkait dengan Pancasila serta dampaknya terhadap isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan LGBT di era digital..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sila pertama mengajarkan bahwa setiap individu wajib mengakui dan mengimani Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan hukum di Indonesia (Suryana,

2020). Dalam konteks ini, fenomena LGBT seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mengharuskan adanya pasangan hidup antara laki-laki dan perempuan. Menurut Rofiq (2021), di era digital ini, maraknya penyebaran pandangan yang bertentangan dengan ajaran agama melalui media sosial memperburuk pemahaman norma ketuhanan. Media sosial menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, termasuk dalam hal norma dan nilai-nilai agama. Dampak dari media sosial ini tidak hanya mempengaruhi generasi muda, tetapi juga mempengaruhi cara pandang masyarakat secara umum terhadap nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam mendidik masyarakat, terutama generasi muda, untuk kembali kepada pemahaman agama yang kuat dan relevansi nilai-nilai ketuhanan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi informasi (Hidayat, 2019). Pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat membantu memperkuat moralitas dan etika generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari luar. Implementasi pendidikan karakter berlandaskan Pancasila menjadi kunci dalam membangun generasi yang beriman dan bertakwa, serta mampu menghadapi dinamika global. Media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman dan interpretasi masyarakat terhadap norma-norma agama. Menurut penelitian Rofiq (2021), penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penyebaran pandangan yang menyimpang dari ajaran agama, yang akhirnya memperburuk pemahaman norma ketuhanan. Peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik ini menuntut adanya regulasi dan edukasi yang tepat agar penggunaan media sosial tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

Sila kedua mengajarkan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi (Effendi, 2020). Namun, dalam kasus LGBT, meskipun hak asasi manusia harus dihormati, fenomena tersebut dianggap bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia (Mudzakir, 2020). Meskipun hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan hak atas identitas pribadi harus dijunjung tinggi, fenomena LGBT masih belum diterima oleh masyarakat Indonesia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia memang penting, tetapi keadilan sosial juga harus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebaikan bersama (Mahfud MD, 2021). Oleh karena itu, jika keberadaan LGBT mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan moralitas sosial, maka hak-hak individu tersebut harus dibatasi (Rahayu, 2022). Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab, di mana hak asasi manusia dihormati tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku. Hal ini mencakup pendekatan yang komprehensif dalam mengelola isu-isu sosial, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam menangani isu sosial LGBT, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek hukum, pendidikan, dan sosial. Menurut Mahfud MD (2021), keadilan sosial tidak hanya terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan agama yang dianut oleh masyarakat.

Sila ketiga menuntut seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup (Anwar, 2021). LGBT sebagai fenomena yang memicu perdebatan sosial berpotensi mengancam persatuan karena dianggap bertentangan dengan norma agama yang telah menjadi fondasi masyarakat Indonesia (Suryadi, 2022). Keberagaman di Indonesia harus tetap dihormati, namun harus tetap menjaga nilai-nilai moralitas dan agama. Penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut melalui platform digital yang seringkali mendukung keberagaman tanpa mempertimbangkan norma-norma lokal dapat menimbulkan perpecahan (Wahid, 2023). Oleh karena itu, pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya disintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap LGBT (Nugroho, 2024). Pendidikan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai perbedaan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah menjadi fondasi bangsa. Pendekatan yang inklusif dalam pendidikan juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat yang beragam. Pendidikan berbasis Pancasila dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Menurut Nugroho (2024), pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai perbedaan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah menjadi fondasi bangsa. Dengan demikian, pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman dapat menjadi benteng yang kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial yang disebabkan oleh konflik nilai dan perbedaan pandangan terhadap isu-isu yang sensitif seperti LGBT.

Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan (Karim, 2020). Dalam kasus LGBT, masyarakat Indonesia yang mayoritas menentang legalisasi LGBT harus memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan kehendak mayoritas (Hidayat, 2021). Musyawarah harus dilakukan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan adil, yang dapat menghargai hak individu dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak melegalkan perkawinan sejenis yang dinilai bertentangan dengan norma sosial merupakan keputusan yang harus diambil berdasarkan kebijaksanaan bersama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Sari, 2023). Proses musyawarah yang inklusif dan partisipatif dapat membantu menciptakan kebijakan yang adil dan bijaksana, yang menghargai hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam pengambilan keputusan di Indonesia sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan bijaksana. Menurut Karim (2020), musyawarah harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Proses ini memastikan bahwa

setiap suara didengar dan dipertimbangkan, sehingga hasil akhir dapat diterima oleh semua pihak sebagai keputusan yang adil dan bijaksana.

Sila kelima mengharuskan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum (Nasution, 2022). LGBT dianggap sebagai perilaku yang mengganggu tatanan sosial dan nilai moral yang sudah ada, sehingga dapat bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan bagi seluruh rakyat (Supriyadi, 2021). Meskipun setiap individu berhak atas perlindungan hukum, perilaku LGBT tetap dianggap mengancam tatanan sosial yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Keadilan tidak dapat dimaknai hanya dari sudut pandang hak individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas (Rahayu, 2023). Dengan demikian, untuk menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral masyarakat, dengan tetap menghormati hak asasi manusia (Nugroho, 2024). Kebijakan yang adil dan berimbang dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana hak individu dihormati tanpa mengabaikan kepentingan sosial yang lebih luas. Implementasi kebijakan yang seimbang ini dapat menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial yang sesungguhnya, di mana setiap individu mendapatkan hak yang sama tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Menurut Rahayu (2023), kebijakan yang adil harus memperhatikan kepentingan sosial yang lebih luas tanpa mengabaikan hak individu. Dengan demikian, kebijakan yang seimbang ini dapat menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial yang sesungguhnya, di mana setiap individu mendapatkan hak yang sama tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan dampaknya terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut peran kita, sebagai generasi muda, untuk beradaptasi dan memilah informasi yang baik dan buruk. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan agar generasi muda tidak terpengaruh oleh arus informasi yang datang di era digital. Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, tercermin dalam sila-sila Pancasila. Fenomena LGBT yang terus meningkat di Indonesia memicu banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Perdebatan ini berakar dari fakta bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika di masyarakat. Nilai-nilai dan etika masyarakat tersebut merupakan landasan dari pembentukan Pancasila, sehingga banyak perilaku LGBT yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Walaupun beberapa sila Pancasila tidak secara langsung melarang perilaku LGBT seperti sila kedua, ketiga, dan kelima, ketidakterimaan masyarakat terhadap perilaku tersebut dapat menyebabkan konflik dan disintegrasi sosial. Maka secara tidak langsung, perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai norma dan etika. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam

menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi informasi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, A. (2020). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmu Sosial, 15(2), 123-135.
- Hidayat, M. (2019). Pancasila dan Tantangan Globalisasi. Jurnal Pendidikan Pancasila, 10(1), 45-58.
- Hidayat, M. (2021). Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia. Jurnal Politik dan Pemerintahan, 12(3), 210-225.
- Karim, A. (2020). Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 8(4), 345-360.
- Mahfud MD, M. (2021). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial. Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(2), 98-112
- .Mudzakkir, A. (2020). Norma Sosial dan Agama dalam Perspektif LGBT. Jurnal Sosiologi Agama, 9(1), 67-80.
- Nugroho, R. (2024). Pendidikan Berbasis Pancasila dalam Era Digital. Jurnal Pendidikan Nasional, 18(1), 33-47.
- Rahayu, S. (2022). Keadilan Sosial dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Jurnal Keadilan Sosial, 11(2), 145-160.
- Rahayu, S. (2023). Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Umum. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 13(1), 78-92.
- Rofiq, A. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Pemahaman Norma Ketuhanan. Jurnal Komunikasi dan Agama, 7(3), 189-202.
- Sari, D. (2023). Kebijakan dalam Pengambilan Keputusan Sosial. Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 99-113.
- Suryadi, T. (2022). Persatuan Indonesia dalam Konteks Keberagaman. Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 10(4), 234-248.
- Suryana, I. (2020). Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Landasan Moral. Jurnal Filsafat dan Agama, 12(1), 56-70.
- Supriyadi, B. (2021). Tatanan Sosial dan Nilai Moral dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Sosial dan Budaya, 14(3), 178-192.
- Wahid, A. (2023). Keberagaman dan Norma Lokal dalam Era Digital. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 9(2), 123-137.
- Anwar, M. (2021). Persatuan Indonesia dalam Konteks Keberagaman. Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 10(4), 234-248.

Mudzakkir, A. (2020). Norma Sosial dan Agama dalam Perspektif LGBT. Jurnal Sosiologi Agama, 9(1), 67-80.

Suryadi, T. (2022). LGBT dan Norma Agama dalam Masyarakat Indonesia. Jurnal Sosial dan Agama, 12(3), 187-201.